SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/35 /KPTS/03/2026

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/03/2026
TANGGAL: 2026

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender	Dinas PPKBPP & PA
3	Pengembangan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026-2030	
4	Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029	
5	Pedoman Penyusunan APBpekon Tahun Anggaran 2026	Dinas PMP
6	Tata Cara Pengalokasian Anggaran Dana Pekon Tahun Anggaran 2026	
7	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Dinas Perkebunan dan Pertenakan
8	Perubahan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	
9	Tata Cara Pembelian Persetujuan Bangunan Gedung / Penyelengaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
10	Renca Detail Tata Ruang Kota Liwa 2025-2045	
11	Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Bangunan Gedung	
12	Perubahan Atas Peraturan Bupati 36 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Alam, Non Alam dan/atau Bencana Sosial	Dinas Sosial
13	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyrakat	Dinas Ketahanan Pangan
14	Pedoman Pengelolaan Perpustakaan melalui Aplikasi Inlislite di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
15	Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	
16	Pedoman Jadwal Retensi Arsip	
17	Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	
18	Pencegahan dan Penanganan Anak Berpotensi Putus Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027	
20	Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar	

20	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis 5 Aksi PM dan 4 Komitmen PM	
21	Beasiswa Pendidikan Kedokteran Umum dan Kedokteran Gigi	Dinas Kesehatan
22	Pengaturan Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	
23	Penerapan Akuntansi BLUD Puskesmas	
24	Sumber Daya Manusia dan Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan	
25	Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Kewirausahaan	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
26	Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara	BKP SDM
27	Elektronifikasi dan Sistem Informasi Pajak Daerah	BAPENDA
28	Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
29	Tata Cara Perhitungan Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon	
30	Kriteria dan Penetapan Pekon/Kelurahan dan Kecamatan Terbaik Lunas PBB	
31	Nila Sewa Media Reklame Milik Pemerintah Daerah	
32	Protap Penanganan Darurat	BPBD
33	*Safety Breifing* Kebajaran dan Gempa Bumi Pada Gedung /Kantor	
34	Rencana Penanggulangan Bencana	
35	Rencana Kontigasi	
36	Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	
37	Penanggulangan Kemiskinan Daerah	BAPEDA
38	Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027	
39	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	
40	Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2027	BKAD
41	Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026	
42	Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026	
43	Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lampung Barat	
44	Perubahan Perbup Perjalanan Dinas Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2026	
45	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025	
46	Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar
47	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	
48	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri	Bagian Perekonomian
49	Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah	

50	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2030	Bagian Tata Pemerintahan
51	*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029	Bagian Organisasi
52	Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan	
53	Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030	
54	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah	
55	Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS